

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan luas daratan mencapai 1.919.443 km².¹ Luasnya wilayah daratan yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan negara ini memiliki potensi alam yang sangat besar dan salah satu pemanfaatan wilayah daratan tersebut yaitu dengan memaksimalkan sektor pertanian. Pertanian merupakan sumber pokok yang dilaksanakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, selain itu juga merupakan sumber pendapatan bagi kas negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris, dalam artian sektor pertanian menduduki peranan yang sangat vital dalam keseluruhan sektor ekonomi nasional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk atau tenaga bekerja yang berkecimpung dalam sektor pertanian sehingga mencapai angka 60% sehingga wajar jika kebijakan pemerintahan Orde Baru memprioritaskan sektor pertanian ini menjadi sektor unggulan.

¹ Harie Saksono, Ekonomi Biru “Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas” *Jurnal Bina Praja*, Vol 5, No. 1 (Maret 2013): 1

Peranan sektor pertanian di samping tercatat sebagai devisa yang cukup besar, juga merupakan *sumber kehidupan* bagi sebagian besar penduduknya.² Maka tidak heran jika masyarakat Indonesia banyak yang menggantungkan hidupnya melalui hasil dari pertanian terutama di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sawah ataupun ladang.

Untuk memaksimalkan hasil pertanian, pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, salah satunya dengan merancang berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah harus saling bekerjasama agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah dengan menerapkan sistem Revolusi Hijau dalam bidang pertanian. Revolusi Hijau ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian khususnya produksi beras, dengan anggapan bahwa melimpahnya produksi beras maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani.³ Dengan penerapan Revolusi Hijau juga, pemerintah bermaksud untuk menjadikan pertanian sebagai komoditi utama serta dapat menjadikan bidang

² Entang Sastratmadja, *Ekonomi Pertanian Indonesia Masalah Gagasan, dan Strategi*. (Bandung: Angkasa 1991) Hal.35

³ Desma Yulia, "Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998" *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 2 (2019): 79

pertanian sebagai tonggak perekonomian Indonesia. Meskipun demikian tidak hanya dari sektor pertanian, pemerintah juga meningkatkan pendapatan negaranya dari bidang jasa, kesehatan, Pendidikan, dan pembangunan-pembangunan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Desa Astanajapura merupakan salah satu desa di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat. Terletak di jalur pantai utara (pantura) yang merupakan batas ujung timur Provinsi Jawa Barat.⁴ Di mana tidak sedikit tanah di desa tersebut difungsikan sebagai wilayah pertanian dan masyarakatnya pun banyak yang berprofesi sebagai petani, baik itu petani dengan tanah milik sendiri dan dikelola sendiri maupun petani bagi hasil. Ada pula masyarakat yang tidak punya sawah tetapi difasilitasi oleh pemerintah desa untuk mengelola lahan sawah dengan cara menyewa dalam kurun waktu tertentu, selain menyediakan lahan pemerintah desa juga menyediakan kebutuhan lain seperti pupuk, obat dan bibit dengan harga yang terjangkau sehingga para petani dapat terbantu dengan adanya penyediaan dari desa.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai pertanian dan aktifitas para petani merupakan ketertarikan tersendiri bagi penulis. Karena pertanian memiliki sejarah

⁴ Iman Sungkawa, Umi Trisnarningsih, Siti Millatul Maulana Mahmuda, "Analisis Location Quotient (LQ) Potensi Wilayah Berbasis Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon" *Jurnal Agrijati*, Vol. 32, No. 2 (April 2018): 51

perjalanan panjang untuk membangun ekonomi kerakyatan dan semakin terarah dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pihak pemerintah, khususnya pada masa orde baru. Maka dengan demikian, penulis mengangkat judul ***“Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Astanajapura Pada Masa Orde Baru”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah pokok yang akan dibahas mengenai Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Astanajapura Pada Masa Orde Baru akan di muat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, agar pembahasan yang dilakukan terfokus dan lebih terarah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Revolusi Hijau di Indonesia pada masa Orde baru?
2. Bagaimana pengaruh Revolusi Hijau terhadap petani di Desa Astanajapura pada masa Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu saja disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, dengan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Revolusi Hijau di Indonesia pada masa Orde baru.
2. Untuk mengetahui pengaruh Revolusi Hijau terhadap petani di Desa Astanajapura pada masa Orde Baru.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki manfaat, begitu juga dengan penelitian ini. Seperti penelitian mengenai Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Astanajapura Pada Masa Orde Baru ini, peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat serta sumbangan terhadap dunia penulisan ilmiah. Manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti

Tentunya untuk peneliti secara pribadi berharap dengan meneliti tema ini akan dapat memperbanyak ilmu, pengetahuan, serta pengalaman mengenai pengaruh revolusi hijau terhadap kesejahteraan para petani khususnya di wilayah Desa Astanajapura. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan guna memenuhi tugas akhir dari masa perkuliahan yaitu pembuatan skripsi pada jurusan Sejarah Peradaban Islam, di Fakultas Usuluddin dan Adab.

2. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan pemahaman bagi para pembaca mengenai gambaran

terhadap Revolusi Hijau terhadap petani pada masa Orde Baru.

E. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Astanajapura Pada Masa Orde Baru, penulis menggunakan pendekatan karya ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya yang membahas hal serupa, adapun kajian terdahulu yang ditulis oleh penulis-penulis lain yang menjadi referensi adalah sebagai berikut:

1. Dwi Sadono, “Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Petani di Indonesia”. (*Jurnal Penyuluhan*, Vol. 4 No. 1 Maret 2008).⁵ Jurnal ini membahas tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional, menjadikan pertanian sebagai lapangan pekerjaan, serta menyediakan bahan mentah bagi industri, dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor non migas. Juga membahas tentang pemberdayaan petani dengan melakukan penyuluhan agar para petani dapat bekerja dengan maksimal dan bisa lebih juga mandiri dalam segi ekonomi. Pada masa Orde Baru, sistem pengelolaan pertanian biasa disebut

⁵ Dwi Sadono, “Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Petani di Indonesia” *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 4, No. 1 (Maret 2008)

dengan revolusi hijau, dimanfaatkan oleh kepentingan pemerintah pada masa itu untuk tujuan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan khususnya padi agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi dengan penduduk yang semakin meningkat. Persamaan yang berkaitan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas tentang perekonomian petani dan keikutsertaan pemerintah dalam hal pemberdayaan hasil pertanian secara umum sedangkan pada penelitian saya lebih spesifik pada wilayah di desa Astanajapura.

2. Hajarani Sabrina Nurin, “*Repelita Dalam Bidang Pertanian di Pacitan Tahun 1994-1998*”. (Skripsi STKIP PGRI Pacitan. 2020).⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan Repelita I-IV dan program-program pertanian pada masa Orde Baru di provinsi Jawa Timur terkhusus wilayah Pacitan. Bagaimana kondisi petani daerah Pacitan pada masa itu dan juga dampak yang dirasakan dari kebijakan pemerintah terutama Repelita IV. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan ekonomi dalam sektor pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini

⁶ Hajarani Sabrina Nurin, “*Repelita Dalam Bidang Pertanian di Pacitan Tahun 1994- 1998*”. (Skripsi. STKIP PGRI Pacitan. 2020)

berfokus di wilayah Pacitan, Jawa Timur dan penelitian saya bertempat di Jawa Barat khususnya desa Astanajapura.

3. Djoko Suseno, Hempri Suyatna, “*Mewujudkan Pertanian yang Pro-Petani*”. (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10 No 3 Maret 2007).⁷

Penelitian ini membahas tentang peranan penting petani bagi ekonomi Indonesia serta hal-hal yang dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan pertanian yang pro-petani. Juga membahas mengenai pembangunan pertanian bukanlah berlatar belakang dengan belas kasihan tetapi keniscayaan karena pertanian memiliki prospek serta potensi untuk dikembangkan. Persamaan dari karya ilmiah ini dengan penelitian saya yaitu mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal upaya meningkatkan ekonomi sedangkan perbedaannya yaitu penelitian saya lebih mengerucut mengenai penerapan Revolusi Hijau yang digalangkan pemerintah guna meningkatkan pertanian dengan harapan petani yang semakin sejahtera.

4. Dyah Candra Dewi, “*Kebijakan Pertanian Yang Mememajjinalkan Petani dan Meruntuhkan*

⁷ Djoko Suseno, Hempri Suyatna, “Mewujudkan Pertanian yang Pro-Petani”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 10 No 3 (Maret 2007)

Kedaulatan Pangan”. (*Jurnal Ilmu Administrasi publik*. Vol. 18 No. 1 April 2014).⁸ Jurnal ini membahas tentang bagaimana cara pengelolaan lahan-lahan pertanian para petani dengan menggunakan revolusi hijau dan dampaknya, juga membahas harga bahan makanan pokok, peran pemerintah dalam hal kebijakan subsidi pangan, serta dampak yang dirasakan petani dengan adanya kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas tentang dampak kebijakan yang diambil pemerintah untuk kesejahteraan petani dan perbedaannya penelitian ini terfokus kepada kebijakan fiskal dan impor bahan pangan sedangkan penelitian saya mengenai kesejahteraan ekonomi petani khususnya pada masa Orde Baru.

F. Landasan teori

Guna memperjelas dan mempermudah dalam proses penelitian Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Astanajapura Pada Masa Orde Baru, penyusun menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historis. Dengan pendekatan historis

⁸ Dyah Candra Dewi, “Kebijakan Pertanian Yang Mememarjinalkan Petani Dan Meruntuhkan Kedaulatan Pangan” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 8 No 1 (April 2014)

ini digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebelum berbicara Mengenai Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Astanajapura Pada Masa Orde Baru, ada beberapa konsep yang menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Diantaranya sebagai berikut:

Welfare state adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.⁹ Gagasan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. *Welfare State* menurut Jeremy Bentham (1748-1832), ialah gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham mengambil istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, Bentham memberikan pendapat bahwa sesuatu yang bisa memunculkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Dan begitupun sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.¹⁰

⁹ V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya" *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020): 24

¹⁰ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*. Vol. 2, No. 1 (Juli, 2016): 104

Kemudian, menurut Esping-Anderson untuk dapat dikategorikan sebagai negara kesejahteraan dapat diuraikan dengan 4 persyaratan, yaitu adanya: 1. *Social citizenship*, 2. *Full democracy*, 3. *Modern industrial relation system*, dan 4. *Rights to education dan expansion of modern mass education*.¹¹ Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan.

Bukti negara Indonesia menerapkan hukum *welfare state* yaitu terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka pada alinea IV pembukaan UUD’45 ini jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa penyelenggara negara (pemerintah) wajib dengan terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Ini merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga

¹¹ Ibid, 113

penyelenggara negara tidak mungkin bisa lepas dari padanya.¹²

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara dengan konsep *welfare state* dimana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Dalam penerapan model *walfer state* Indonesia menggunakan model minimalis, bisa dilihat dari landasan dasarnya yaitu UUD'45, UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang tergolong kecil.

Dalam bukunya Siagan menuliskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah berupa upaya dan desain pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat yaitu: manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.¹³ Birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksanaan yang dimana bertugas untuk menginterpretasikan program agar operasional dan dapat berjalan dengan baik.

¹² V. Hadiyono. *Op, Cit.* 28

¹³ Sondang P Siagan, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hal. 225

Sektor pertanian merupakan salah satu pusat perhatian dalam bidang pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan serta pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut bidang pangan.¹⁴

Kesejahteraan petani yang menjadi salah satu hal dasar yaitu dengan kemampuan para petani dalam membeli dan memenuhi kebutuhan yang dialokasikan kepada kebutuhan rumah tangga melalui pendapatan petani. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat melalui semakin tingginya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Semakin tinggi daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan penggunaan maka semakin tinggi nilai tukar petani dan dapat dikatakan semakin sejahtera. Nilai tukar petani juga menyangkut pada kekuatan relatif daya beli komoditas dari produk yang dihasilkan serta dijual oleh para petani dengan barang dan jasa yang dibeli dan dikonsumsi petani.¹⁵

Petani yang mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan sejahtera hidupnya. Mereka memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan hasil dari usahanya dalam bidang pertanian sehingga

¹⁴ Ulfirah Isbah, Rita Yani Iyan “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau” *Jurnal Sosial ekonomi Pembangunan*. Vol. 7, No. 19 (November 2016): 45

¹⁵ Muchjidin Rachmat “Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran, dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani” *Forum Penelitian Argo Ekonomi*, Volume 31, No. 2 (Desember 2013), hal. 113

petani semakin tinggi tingkatannya baik segi finansial maupun segi sosial masyarakat.

Revolusi Hijau pertama kali dicetuskan oleh William S. Gaund, tujuan dari adanya revolusi hijau yaitu untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, terutama padi dan gandum yang dreastis di negara-negara berkembang dengan menggunakan varian yang mampu mendapatkan hasil tinggi (*hight yielding varieties/HYV*). Revolusi hijau ini dipelopori oleh Norman Borlaug seorang yang ahli dalam bidang tanaman asal Amerika Serikat yang melakukan penelitian di Meksiko pada tahun 1940-an. Dari hasil penelitian tersebut Meksiko berhasil mengatasi kekurangan pangan, setelahnya negara-negara lain juga melakukan hal serupa.¹⁶

Revolusi hijau menggunakan teknologi yang baru untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta menggunakan bibit yang unggul, pupuk kimia, peptisida antihama, dan sistem irigasi yang memadai.¹⁷ Itu semua merupakan kunci utama agar hasil pertanian meningkat dengan signifikan dan dalam waktu yang singkat.

¹⁶ Guru Besar IPB, *Merevolusi Revolusi Hijau*. (Bogor: IPB Press, 2012), hal. 4

¹⁷ Haryanto Rinardi, dkk. Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 2 (2019): 127

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pendekatan studi pustaka, jika ditinjau dari isi pemaparan rumusan masalah serta tujuannya. Menurut Afrizal menuliskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang membahas ilmu-ilmu sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data baik lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak perlu menggunakan angka-angka untuk analisisnya.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, metode yang digunakan dalam penelitian sejarah hasilnya berupa historiografi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan setiknya memiliki 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan berakhir dengan penulisan atau historiografi.¹⁹ Berikut ini pemaparan lebih jauhnya:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari terlebih dahulu. Pada bagian ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik

¹⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019) hal. 13

¹⁹Anton Dwi Laksono, *Apa Itu sejarah Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. (Pontianak: Derwati Press, 2018), hal. 94

yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan.²⁰ Sumber sejarah juga dapat diartikan sebagai sebuah benda sebagai bukti sejarah.

Secara garis besar, sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer adalah apabila sumber atau penulis sumber terlibat, melihat, atau mendengar secara langsung sebuah peristiwa (tangan pertama). Sumber sekunder adalah istilah yang digunakan dalam historiografi untuk merujuk pada karya sejarah yang ditulis berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya dengan merujuk pula pada sumber-sumber sekunder lainnya. Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kombinasi sumber primer dan sekunder.²¹

Pada tahapan penelitian ini, penulis mencari sumber-sumber penelitian yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi yang akan diteliti serta mewawancarai orang-orang yang memang merasakan bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru secara langsung, kemudian mencari arsip-arsip di balai kearsipan daerah maupun nasional, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

²⁰ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 93

²¹ Anton Dwi Laksono, *Op, Cit.* Hal. 100

Selain sumber-sumber yang disebutkan di atas, pada penelitian ini penulisan juga mengambil rujukan dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian karya ilmiah, serta media cetak yang ditulis pada masa Orde Baru yang tentunya membahas tentang Revolusi hijau bagi para petani sesuai dengan judul yang akan diteliti.

2. Kritik

Tahapan ini merupakan proses di mana peneliti memilah-milih serta menentukan sumber-sumber mana saja yang sesuai untuk dijadikan bahan penelitian dan mana yang tidak sesuai. Maka, kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.²² Ada 2 jenis kritik, yaitu kritik internal (mempermasalahkan sumber tersebut dapat masuk atau tidak dalam penelitian) dan kritik eksternal yaitu kritik terhadap kealsian sumber juga sejarawan harus dapat menguji keakuratan dokumen.²³

a. Kritik Internal

Kritik Internal mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, dikecohkan dan lain-lain. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengecekan isi dari sumber yang

²² Anton Dwi Laksono, *Op. Cit.* Hal. 106

²³ *Ibid*, hal. 108

²⁴ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 37

didapat sesuai atau tidaknya dengan bukti dan fakta yang ada. Dari sumber lisan penulis juga menyeleksi narasumber dalam hal ini kemampuannya dalam kompetensi berkaitan dengan kajian penulis.

b. Kritik eksternal

Kritik eksternal wajib dilakukan oleh sejarawan untuk mengetahui keaslian sumber. Dalam tahapan ini yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah.²⁵ Dalam melakukan kritik eksternal penulis melakukan seleksi-seleksi berdasarkan sisi fisik dari sumber yang didapat seperti sumber yang didapat berupa dokumen arsip ataupun naskah maka harus diteliti kertasnya, kata-katanya, bahasanya, kalimatnya atau tintanya.

3. Interpretasi

Setelah tahapan melalui tahapan heuristik dan kritik, maka tahapan selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan suatu pembayangan atau suatu tindakan imajinasi atas konteks peristiwa yang akan kita teliti.²⁶ Menurut Kuntowijoyo interpretasi ada 2 macam, yaitu analisis (penguraian) dimana data yang sudah ada dibandingkan serta diuraikan lebih mendalam dan sintesis (menyatukan) yaitu setelah semuanya data terkumpul

²⁵ Sulasman, *Op. Cit.* Hal. 101

²⁶ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik.* (Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press, 2020), hal. 84

maka semua data disatukan.²⁷ Maka dalam tahapan ini penulis berusaha untuk mengurai fakta-fakta yang telah didapat dari tahap sebelumnya dan telah diverifikasi kemudian disatukan untuk dilanjut pada tahap berikutnya.

4. Historiografi

Tahap terakhir pada penelitian sejarah yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Menulis sejarah bukan hanya sekedar menyusun rangkaian cerita tanpa adanya landasan dan sumber-sumber. Historiografi selain penyusunannya berlandaskan fakta dan hasil-hasil penelitian, juga penulis dituntut untuk menyampaikan pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Maka dari itu penulis sejarawan haruslah memiliki kecakapan dan kemahiran.²⁸

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada tahap ini, penulis harus pandai dalam merangkai dan menuliskan yang fakta-fakta ada dengan menggunakan kalimat yang dapat difahami dan sesuai dengan sistem penulisan. Maka dalam penulisan ini secara garis besar terdiri atas beberapa segmen penulisan yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antar satu bab dengan bab lainnya.

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 78

²⁸ Anton Dwi Laksono, *Op, Cit.* Hal. 110

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika dalam laporan penelitian.

Bab II membahas sejarah dan kebijakan pertanian masa Orde Baru.

Bab III membahas gambaran umum Desa Astanajapura meliputi kondisi geografis dan demografis.

Bab IV membahas tentang pengaruh Revolusi Hijau terhadap petani di Desa Astanajapura pada masa Orde Baru.

Bab V membahas kesimpulan dan saran secara ringkas dan memiliki titik poin pembahasan dari bab-bab yang sebelumnya. Pada bagian ini terdiri dari dua subbab yaitu: kesimpulan dan saran.